
Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Kebijakan Merdeka Belajar Di Kabupaten Pandeglang

Oleh :

Dinta Nurachma, Arenawati

dintanur06@gmail.com

Prodi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹⁾²⁾

ABSTRAK

Salah satu produk Merdeka Belajar adalah Program Sekolah penggerak. Pada prinsipnya Sekolah Penggerak bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dan Sekolah penggerak ini merupakan program yang fokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui perwujudan dan fokus pada pembelajaran berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Sekolah penggerak mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan ciri-ciri Kebijakan Pendidikan. Pada pelaksanaannya, Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Pandeglang ditemui berbagai masalah seperti kurangnya peran pengawas pada sekolah penggerak dalam membina dan meningkatkan sumber daya sekolah, kurangnya sosialisasi dan dukungan dari pemerintah daerah dan keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan program. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Pandeglang. Teori yang digunakan adalah teori George C. Edward III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Pandeglang belum berjalan sesuai dengan tujuan yang ada karena masih dibutuhkannya upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dimulai dari komunikasi yang tetap berjalan antar semua pihak yang bersangkutan. Sumber daya yang memadai, dan kesiapan atau sikap para pelaksana kebijakan agar terlaksananya kebijakan program sekolah penggerak yang sesuai aturan dan terlaksana dengan baik. Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Sekolah Penggerak

ABSTRACT

One of Merdeka Belajar's products is the Driving School Program. In principle, the Driving School aims to improve the quality of education in Indonesia, and this Driving School is a program that focuses on developing student learning outcomes holistically through realizing and focusing on learning based on the Pancasila student profile. Driving schools have characteristics that are in accordance with the characteristics of the Education Policy. In its implementation, the Driving School Program in Pandeglang Regency encountered various problems such as the lack of a role for supervisors at driving schools in developing and improving school resources, lack of outreach and support from the local government and budget limitations which hampered program implementation. The aim of this research is to determine the implementation of the Driving School Program in the Independent Learning Policy in Pandeglang Regency. The theory used is the theory of George C. Edward III. This research uses descriptive qualitative methods. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The results of the research show that the implementation of the Mobilizing School Program in Pandeglang Regency has not proceeded according to the existing objectives because efforts are still needed to resolve these problems starting from ongoing communication between all parties concerned. Adequate resources, and the readiness or attitude of policy implementers so that the driving school program policy is implemented in accordance with the rules and is carried out well.

Key Words : Implementation; policy; sekolah penggerak

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebuah cara untuk mengubah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga Indonesia menjadi negara yang maju. Proses pelaksanaannya dibutuhkan kebijakan pendidikan sebagai landasan untuk menyeragamkan mutu pendidikan di Indonesia. Visi pendidikan Indonesia adalah untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkeperibadian melalui terciptanya pelajar pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebhinekaan global. Maka dari itu, untuk meningkatkan SDM melalui Pendidikan perlu adanya perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sebagai upaya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan peningkatan mutu pendidikan agar lebih merata kepada lebih banyak sekolah dan daerah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim, menerbitkan surat edaran nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar atau Kebebasan Belajar. Untuk menindaklanjuti mengenai merdeka belajar maka berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 162/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul yaitu kepala sekolah dan guru.

Pada tahun 2021, Kemendikbudristek berhasil melahirkan 2.500 sekolah penggerak angkatan pertama di 34 provinsi yang meliputi 111 kabupaten/kota. Salah satu Kabupaten di Provinsi Banten yang terpilih untuk menjalankan program sekolah penggerak yaitu Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu kabupaten yang ditunjuk untuk melaksanakan program sekolah penggerak. Hal tersebut dipilih berdasarkan kesanggupan atau komitmen untuk

mendukung Program Sekolah Penggerak dalam hal anggaran 7 dan kebijakan, terutama untuk tidak merotasi Kepala Sekolah dan Guru selama 4 tahun kecuali dengan izin Direktorat Kemendikbud terkait. Dengan adanya program sekolah penggerak diharapkan Kabupaten Pandeglang bisa memberi harapan baru agar menjadi kabupaten yang bisa memberikan Pendidikan yang berkualitas.

Kabupaten Pandeglang adalah sebuah wilayah yang berada di Provinsi Banten. Terbagi menjadi 35 Kecamatan dengan terdiri dari 13 Kelurahan. Kabupaten Pandeglang sendiri menjadi salah satu Kabupaten yang mempunyai predikat sekolah penggerak terbanyak, terdiri dari 84 unit sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang mulai dari tingkat PAUD, TK, SD dan SMP. Namun, berdasarkan ketetapan dari Kemendikbudristek pada Tahun 2021 jumlah sekolah penggerak pada tingkat SMP yang terdaftar sebagai sekolah penggerak Angkatan 1 di Kabupaten Pandeglang hanya terdapat 9 Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak dalam merealisasikan kebijakan Merdeka belajar pada program sekolah penggerak (PSP).

Tabel 1 Jumlah sekolah penggerak di kabupaten pandeglang

No	Jenjang	Ang 1	Ang 2	Ang 3
1.	TK	4	11	6
2.	SD	22	20	-
3.	SMP	9	10	2

Terlihat dalam Tabel 1 yang menunjukkan data sekolah SMP penggerak di Kabupaten Pandeglang pada Angkatan 1 hanya berjumlah 9 sekolah dari jumlah keseluruhan 109 sekolah SMP yang terdapat di Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak semua sekolah mendaftar menjadi sekolah penggerak dikarenakan ketidaktahuan sekolah mengenai program tersebut.

Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah daerah kurang memantau proses

jalannya program sekolah penggerak terlihat dari kurangnya sosialisasi mengenai adanya program sekolah penggerak kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang. kurangnya peran pengawas pada sekolah penggerak dalam membina dan meningkatkan sumber daya sekolah. keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program yang sudah disusun oleh sekolah.

Tabel 1 menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah sekolah pada angkatan dua sekolah penggerak tingkat SMP dan mengalami penurunan pada angkatan tiga menjadi salah satu daya tarik untuk memilih SMP sebagai fokus pada penelitian ini. Selain itu, sekolah penggerak tingkat SMP di Kabupaten Pandeglang yang sudah melaksanakan program sekolah penggerak lebih menonjol dari segi kegiatan dan peningkatan sekolah dibandingkan dengan tingkat SD. Oleh karena itu, fokus penelitian ini nantinya hanya pada implementasi program sekolah penggerak tingkat SMP pada Angkatan 1. Dengan demikian kajian ini berfokus pada implementasi program sekolah penggerak pada Angkatan 1 dengan jenjang SMP. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Pandeglang.

LITERATURE REVIEW

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu studi yang paling penting dalam Program Studi Administrasi Publik, karena sangat dibutuhkan untuk membuat suatu rancangan perundang-undangan atau kebijakan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Berbagai macam permasalahan dalam pemerintahan dalam rangka pembangunan dapat dipecahkan melalui suatu kebijakan publik.

Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar

pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan erat dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat (Agustino, 2008:7).

Implementasi Kebijakan Publik

Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Tahap lanjutan dari perumusan kebijakan oleh para pembuat kebijakan atau "policy makers" adalah pengimplementasian kebijakan tersebut. Dalam arti sempit, implementasi merupakan suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalan atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan suatu kebijakan dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kebijakan (stakeholders), aktor politik, organisasi (baik organisasi publik maupun privat), prosedur, dan tekni secara sinergi yang digerakan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu sesuai dengan yang dikehendaki.

Program Sekolah Penggerak

Sekolah Penggerak berasal dari dua kata yaitu sekolah dan penggerak. Secara bahasa menurut KBBI daring, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sedangkan penggerak adalah orang yang menggerakkan. Arti lainnya dari penggerak adalah alat untuk menggerakkan (Kemendikbud, 2022). Sedangkan menurut istilah, Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Kepala sekolah dan guru dari sekolah

penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lain.

Program Sekolah Penggerak Terdiri dari 5 jenis intervensi yang terintegrasi berupa pendampingan konsultatif dan asimetris kepada Pemerintah Daerah, pelatihan dan pendampingan kepala sekolah dan guru, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Program Sekolah Penggerak berupaya mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk melaksanakan amanat negara dalam memberikan hak dan pemerataan pendidikan kepada seluruh warga negara. Untuk itu, segala regulasi yang mengatur menjadi indikator penting demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan pendidikan yang berkualitas agar terciptanya generasi penerus yang mampu membangun Indonesia lebih baik kedepannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada. Penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah fenomena yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan berdasarkan pada purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2005:54). Teknik pengumpulan data yang digunakan ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber data. Menurut Sugiyono (2012:327). triangulasi Teknik berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Sedangkan triangulasi sumber data

dilakukan dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain.

PEMBAHASAN

Merdeka Belajar merupakan kebijakan pendidikan yang mengatur alur pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Pernyataan tersebut sesuai dengan pengertian kebijakan pendidikan, yaitu program atau peraturan tertulis atau rencana kebijakan yang berkaitan dengan sektor pendidikan, mulai dari sektor pendidikan formal, nonformal, Pendidikan Anak Usia Dini, perguruan tinggi, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Konsep kebebasan belajar sejalan dengan definisi belajar yang sebenarnya, yang telah berubah dari pengajaran menjadi pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dirancang untuk mendorong belajar siswa, dimana kegiatan belajar mengajar tidak hanya terfokus pada guru saja, tetapi siswa juga lebih aktif.

Salah satu produk Merdeka Belajar adalah Program Sekolah penggerak. Pada prinsipnya Sekolah Penggerak bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dan Sekolah penggerak ini merupakan program yang fokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui perwujudan dan fokus pada pembelajaran berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Sekolah penggerak mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan ciri-ciri Kebijakan Pendidikan. Ciri-ciri kebijakan pendidikan ada tiga: ada tujuan pendidikan, ada aspek hukum formal, dan ada konsep operasional

Untuk mencari tahu mengenai bagaimana pelaksanaan Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Pandeglang, peneliti menganalisis 4 indikator yang dikembangkan oleh Edward III yang menurutnya dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yakni: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun pembahasan yang

dapat peneliti paparkan yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat, dan konsisten.

Berdasarkan Teori Edward III salah satu dimensi yang menentukan keberhasilan implementasi suatu program yaitu pada aspek komunikasi. Berdasarkan teori tersebut benar adanya bahwa komunikasi menjadi aspek penting yang dapat menjadi faktor suatu kebijakan berjalan dengan baik atau tidak, dengan adanya komunikasi yang terjalin antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan maka, program yang diciptakan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan ternyata komunikasi sangat penting, seperti komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan Sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Pandeglang pada awalnya belum berjalan dengan maksimal. Tidak adanya kejelasan terkait program sekolah penggerak, mulai dari penjelasan apa itu program sekolah penggerak, tujuannya dan siapa pelaksana yang bertanggung jawab untuk mengawasi program tersebut. Setelah adanya komunikasi yang terjalin dengan BPMP, BGP, Dinas Pendidikan dan Sekolah maka, instruksi program sekolah penggerak secara jelas di sosialisasikan oleh pemerintah daerah khususnya oleh Dinas Pendidikan untuk diteruskan informasinya kepada satuan sekolah penggerak.

2. Sumber Daya

Sumberdaya merupakan indikator kedua yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut

Edward III yang didalamnya terdapat beberapa sub indikator, yang pertama yakni Informasi merupakan sub indikator dari sumberdaya.

Sumber daya finansial sekolah berasal dari BOS Kinerja yang dipergunakan untuk meningkatkan fasilitas IT di sekolah untuk menciptakan digitalisasi sekolah. Fasilitas untuk implementasi Program Sekolah Penggerak ini tidak jauh berbeda dengan fasilitas-fasilitas yang sudah dimiliki sekolah hanya saja ada penambahan alat-alat IT. Akses terhadap informasi mengenai Program Sekolah Penggerak juga mudah didapatkan. Meskipun terdapat kendala dalam dimensi sumber daya ini seperti adaptasi pada perubahan, tuntutan kompetensi digital guru, dan beberapa kendala teknis yang menghambat implementasi Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Pandeglang terutama pada awal pelaksanaan program sekolah penggerak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait sumber daya yang menjadi faktor penting dalam suatu implementasi kebijakan program sekolah penggerak sesuai dengan hasil yang peneliti temukan di lapangan. Bahwa adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan sekolah penggerak yang disebut dengan dana bos kinerja yang didapatkan sebesar 75 juta untuk membeli alat-alat digital seperti komputer dan lain sebagainya. Tentu saja dana tersebut bisa dikatakan kurang karena masih banyak sekali program yang mengharuskan untuk didanai oleh sekolah dengan menggunakan dana bos kinerja tersebut.

3. Disposisi

Berdasarkan Teori Edward III, dimensi ketiga yang menentukan keberhasilan implementasi suatu program yaitu pada aspek disposisi. Disposisi disini yaitu mengacu kepada sikap para pelaksana kebijakan. Benar adanya bahwa teori tersebut sangat penting dalam implementasi suatu program, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Jumardi Budiman, dkk dalam jurnal pendidikan dasar perkhasa tahun 2021 menyatakan bahwa disposisi menjadi factor pendukung dalam implementasi program sekolah penggerak yang menyatakan bahwa sikap, komitmen dan respon positif guru terhadap perubahan kebijakan pendidikan serta dukungan orang tua melalui komite sekolah menjadi sangat penting. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya respon atau dukungan dari berbagai pihak yang saling bekerjasama untuk menjalani program sekolah penggerak menjadi salah satu factor yang membuat implementasi program dapat berjalan dan berhasil sesuai dengan tujuannya.

Sekolah juga berkomitmen untuk melaksanakan Program Sekolah Penggerak dengan terus mengimbaskan praktik-praktik baik, menjaga integritas, dan meningkatkan motivasi guru. SDM pelaksana kebijakan juga telah diatur sesuai dengan keahlian dan perannya masing-masing. Tidak ada insentif dalam melaksanakan kebijakan Program Sekolah Penggerak, melainkan bentuknya berupa reward atau apresiasi saja.

4. Struktur Birokrasi

Dalam suatu implementasi kebijakan, meskipun segala unsur pendukung kebijakan telah terpenuhi namun terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik menurut teori implementasi yang dikembangkan oleh Edward III. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Ada dua hal yang menurut Edward III dapat mendongkrak keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yakni terdapat Standar Operating Prosedur (SOP) serta dengan melakukan fragmentasi.

Prosedur pelaksanaan program sekolah penggerak ini berdasarkan

keputusan Kemendikbudristek Nomor 162/M/2021 dan aturan, panduan, serta publikasi lainnya dari Kemdikbudristek terkait Program Sekolah Penggerak. Terkait dengan penyebaran tanggungjawab maka dalam implementasi program sekolah penggerak yang melakukan pengawasan pada program sekolah penggerak yaitu fasilitator yang terdiri dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru Penggerak (BGP) yang ditugaskan untuk memberikan pengawasan dan bimbingan dalam Implementasi Program Sekolah Penggerak. Sedangkan pengawasan disekolah biasanya dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bertugas memonitoring dan melaporkan kegiatan pelaksanaan program sekolah penggerak pada tingkat sekolah.

SIMPULAN

Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik. Secara tahapan dan juga ketentuan, akan tetapi pelaksanaannya masih belum maksimal. Selama penerapan Program Sekolah Penggerak tidak dapat terlepas dari lima intervensi yaitu Pendampingan Konsultatif dan Asimetris, Penguatan SDM Sekolah, Pembelajaran Paradigma Baru, Perencanaan Berbasis Data, dan yang terakhir yaitu Digitalisasi Sekolah. Sekolah penggerak secara otomatis akan menerapkan kurikulum merdeka, dikarenakan sekolah penggerak merupakan project dalam penerapan kurikulum merdeka. Sehingga semua yang berkaitan dengan pembelajaran akan berorientasi pada kurikulum merdeka. Secara konsep dan teori, guru sudah memahami. Akan tetapi secara praktiknya, guru masih belum maksimal, seperti halnya pembelajaran diferensiasi dan metode yang masih didominasi ceramah serta sistem pembelajaran yang 131 masih monoton dan kesulitannya guru yang masih belum bisa menggunakan pembelajaran secara digital.

REFERENSI

Anandasari, S. F., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (Sra) Di Kota Bekasi (Vol. 21, Issue 4). [Http://Ejurnal.Ubharajaya.Ac.Id/Index.Php/Jki](http://Ejurnal.Ubharajaya.Ac.Id/Index.Php/Jki)

Ardika Prasada, E. (N.D.). Penyuluhan Implementasi Program Sekolah Penggerak Berdasarkan Sk Kemendikbud Nomor 162 Tahun 2021 Di Sd Negeri 13 Rantau Alai. [Https://Doi.Org/10.33061](https://Doi.Org/10.33061)

Firdaus Syafi, F. (N.D.). Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar “Merdeka Belajar Dalam Menyambut Era Masyarakat 5.0” Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak

Budiman, J., Irfan, M., & Malino, T. M. M. (2022). Implementasi Program Sekolah Penggerak (Psp) Tahun 2021 Di Sdn 23 Menyumbang Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 8(2), 87–104. [Https://Doi.Org/10.31932/Jpdp.V8i2.1581](https://Doi.Org/10.31932/Jpdp.V8i2.1581)

Marmoah, S., Istiyati, S., Mahfud, H., & Supianto, S. (N.D.). Dwija Cendekia: Jurnal Riset Pedagogik Persepsi Guru Terhadap Implementasi Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar.

Nurul, R., & Candradewini, ; (N.D.). Pelatihan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota. In *Jurnal Administrasi Negara*